

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Beberapa Dimesi Pembangunan Kelautan	3
1.3 Baberapa Dimensi Pembangunan Kewilayahan	6
BAB 2 KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI ARCHIPELAGO	11
2.1 “Mengapa” Perlu Konsep Pembangunan Ekonomi Archipelago	11
2.2 “Apa” Itu Konsep Pembangunan Ekonomi Archipelago	13
2.2.1 Konsep dan Tujuan	13
2.2.2 Arus Barang dan Fungsi Simpul Jasa Distribusi	14
2.2.3 Strategi Pengembangan Wilayah Archipelago	15
2.3 “Bagaimana” Konsep Pembangunan Ekonomi Archipelago Dijabarkan	16
2.4 Pembangunan Ekonomi Archipelago dan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI)	19
2.4.1 Kerangka Konseptual Pengembangan Kawasan KTI	19
2.4.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Archipelago dan Kawasan Pembangunan “SEMEJA”	22

BAB 3	KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN "SEMEJA"	25
3.1	Deklarasi Juanda (1957) dan Prinsip Negara Kepulauan (1982)	25
3.2	Orientasi Pembangunan ke Arah Daratan dan ke Arah Laut	27
3.3	Konsep Pembangunan dan Kawasan Pembangunan "Semeja" (Satu Meja)	29
3.4	Lingkungan Usaha dan Sasaran Pembangunan Kawasan "Semeja"	31
3.5	Pemanfaatan Jalur Pelayaran Selat Lombok Melewati Selat Makassar sebagai Life Line untuk menunjang Pembangunan Kawasan Semeja	35
BAB 4	PERENCANAAN KAWASAN PERAIRAN DAN PANTAI	39
4.1	Kawasan Perairan dan Pantai Mempunyai Peranan Penting dalam Pembangunan	39
4.2	Batasan Kawasan Pantai (Pesisir) dan Perairan/Laut	40
4.3	Manajemen Kawasan Pesisir Secara Terpadu	41
4.4	Kebijakan Nasional dan Spasial Tentang Kawasan Pesisir	43
4.5	Penentuan Batas Kawasan Pesisir	44
4.6	Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dalam Pembangunan dan Perencanaan Kawasan Pantai	47
4.7	Tingkat Adaptasi Masyarakat	49
	4.7.1 Keberhasilan Peng-Kawasan Pantai	49
	4.7.2 Kriteria Adaptasi dan Teknologi	49
	4.7.3 Pengukuran (Penilaian)	50
	4.7.4 Kriteria Kondisi Fisik	52
4.8	Pendekatan Sistem untuk Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pantai	52
BAB 5	MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN	57
5.1	Sumberdaya Kelautan Mempunyai Arti yang Sangat Strategis	57
5.2	Beberapa Permasalahan dan Isu Strategis	59
	5.2.1 Aspek Sosial	59
	5.2.2 Aspek Ekonomi	59

5.2.3	Aspek Ekologi	60
5.2.4	Aspek Administratif	60
5.3	Model Perwilayahan Perairan Laut	61
5.3.1	Model Perwilayahan sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 1999	62
5.3.2	Model Perwilayahan Terintegrasi	63
5.3.3	Model Perwilayahan yang Terintegrasi dan Penerapan Prinsip Equal Distance (Jarak yang Sama)	63
5.4	Paradigma Baru dan Pendekatan yang Serasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	64
5.5	Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut	68
5.6	Model Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut	69
5.7	Langkah-langkah Utama Pembinaan dan Pengembangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perairan Laut	73
5.7.1	Tujuan Sosial	73
5.7.2	Tujuan Ekologi	74
5.7.3	Tujuan Ekonomi	75
5.7.4	Aspek Administratif	77
5.8	Sistem Manajemen (Pengelolaan) Sumberdaya Perairan Laut yang Komprehensif	79
BAB 6	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TRANSPORTASI GUGUS PULAU	83
6.1	Pengembangan Wilayah Gugus Pulau	83
6.1.1	Konsep Pengembangan Wilayah Gugus Pulau	83
6.1.2	Konsep-konsep Teoritik Pengembangan Wilayah	85
6.2	Strategi Pengembangan Wilayah Gugus Kepulauan	86
6.3	Berbagai Dimensi Pengembangan Wilayah Gugus Pulau	87
6.4	Transportasi Gugus Pulau	88
6.4.1	Transportasi Bersifat Lintas Sektoral dan Lintas Regional	88
6.4.2	Sistem Transportasi Gugus Pulau	90
6.5	Pelayaran Perintis dan Pembangunan Daerah	94
6.6	Wilayah dan Trayek Pelayaran Perintis	96

BAB 3	6.7	Fungsi Pelayaran Perintis Menunjang Pembangunan Daerah.	98
	6.7.1	Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayaran Perintis Bersifat Lintas Sektoral dan Lintas Institusional	98
	6.7.2	Tipologi Wilayah Perintis	100
	6.8	Dampak Pembangunan Pelayaran Perintis	102
BAB 7		STRATEGI DAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN PELABUHAN LAUT DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	105
	7.1	Pelabuhan Laut Mempunyai Fungsi yang sangat Strategis dalam Sistem Transportasi	105
BAB 4	7.2	Pendekatan Spasial dan Lingkup Pengkajian Pembangunan Pelabuhan	107
	7.2.1	Pendekatan Geografi Pelabuhan	107
	7.2.2	Lingkup Pengkajian Pembangunan Pelabuhan	109
	7.2.3	Skenario Pengembangan Pelabuhan	112
	7.2.4	Strategi Pengembangan Pelabuhan	115
	7.3	Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI)	121
	7.3.1	Konsep Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI)	121
	7.3.2	Pelayanan Arus Barang	124
BAB 8		KETERHUBUNGAN DAN KETERGANTUNGAN ANTAR WILAYAH	129
	8.1	Analisis Regional dan Pengertian Keuntungan Komparatif	129
	8.2	Kriteria Perwilayahan dan Interaksi Antar Titik-Titik Spasial	130
BAB 5	8.3	Struktur Hirarki dan Hubungan Fungsional Antar Pusat atau Kota	134
BAB 9		TEORI-TEORI PUSAT PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAN SIMPUL JASA DISTRIBUSI	137
	9.1	Pentingnya Dimensi Kewilayahan dan Ketataruangan	137
	9.2	Teori Tempat Sentral (<i>Central Place Theory</i>)	139

9.3	Teori Kutub Pertumbuhan dan Kutub Pembangunan yang Terlokalisasi (<i>Growth and Development Centre Theory</i>)	140
9.4	Konsep Hirschman dan Myrdal	142
9.5	Difusi Inovasi	144
9.6	Suntikan Modal Kepada Wilayah Pengaruh	147
9.7	Teori Simpul Jasa Distribusi (<i>Distribution Service Knot Theory</i>)	149
9.7.1	Pendekatan Arus Barang	149
9.7.2	Pendekatan Orientasi Pedagang (Rahardjo Adisasmita)	153
BAB 10 PENDEKATAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		155
10.1	Pendekatan Regional	155
10.2	Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah	157
10.2.1	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sumberdaya	157
10.2.2	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Komoditas Unggulan	159
10.2.3	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelaku Pembangunan	160
10.3	Pengembangan Daerah Perdesaan dan Daerah Perkotaan	160
10.4	Pusat-pusat Pelayanan Kecil, Produksi Pertanian, dan Transportasi Pedesaan	161
10.5	Kaitan Fungsional Antar Kota	162
BAB 11 TATA RUANG EKONOMI, KAWASAN ANDALAN DAN KAWASAN GUGUS PULAU		165
11.1	Konsep Tata Ruang Ekonomi	165
11.2	Kawasan Andalan (Konsep dan Manajemen Pertumbuhan)	170
11.2.1	Batasan Kawasan Andalan	170
11.2.2	Informasi Dasar Faktor-faktor Pertumbuhan Kawasan Andalan	173
11.3	Manajemen Pertumbuhan Kawasan Andalan dan Manajemen Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an	175
11.4	Kawasan Gugus Kepulauan	183

11.4.1	Pendekatan Kawasan dalam Pengembangan Wilayah	183
11.4.2	Strategi Pengembangan	184
11.4.3	Berbagai Dimensi Pengembangan Kawasan Gugus Kepulauan	185
BAB 12 DAERAH PEDESAAN, PERKOTAAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU: MASALAH DAN KEBIJAKAN		187
12.1	desa sebagai daerah produksi	187
12.2	Kerangka Konseptual	188
12.3	Masalah dan Kebijakan	192
12.3.1	Pembangunan Pedesaan	192
12.3.2	Pembangunan Perkotaan	194
12.4	Pengembangan Kawasan Terpadu	196
12.5	pedesaan dan perkotaan saling membutuhkan	197
BAB 13 BEBERAPA ISU SOSIAL PENGEMBANGAN WILAYAH		199
13.1	Topik Permasalahan Sosial	199
13.2	Keserasian Sosial	200
13.3	Transformasi Sosial	201
13.4	InfraStruktur Sosial	202
13.5	Kapasitas Kebijakan dan Perencanaan untuk Memecahkan Isu Sosial	203
BAB 14 OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI SUATU PROPINSI		205
14.1	Otonomi Daerah	205
14.1.1	Fungsi Pemerintah Daerah	205
14.1.2	Perencanaan Anggaran	208
14.1.3	Perencanaan Strategik	209
14.1.4	Manajemen Keuangan Daerah	210
14.1.5	Pembangunan Daerah	211
14.2	<i>Capacity Building</i> Menuju Otonomi Daerah	213
14.2.1	Konsep <i>Capacity Building</i>	213
14.2.2	<i>Capacity Building</i> Sebagai Strategi Otonomi Daerah	215

BAB 1	14.2.3 <i>Capacity Building</i> dan <i>Good Governmance</i> Sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	215
14.3	Pengembangan Kerjasama Antar Daerah di Suatu Propinsi	219
	14.3.1 Permasalahan Utama dan Tujuan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah	219
	14.3.2 Landasan Konseptual Tentang Pengembangan Kerjasama Antar Daerah	221
BAB 15	PENUTUP	225
	DAFTAR PUSTAKA	227
	TENTANG PENULIS	235

~oo0oo~

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terbesar di dunia, terdiri dari 17.500 pulau besar dan pulau kecil yang tersebar di sekitar garis katulistiwa, yang memanjang dari Sabang (yang terletak paling ujung barat provinsi Nangroe Aceh Darussalam) sampai ke Jayapura yang terletak paling ujung provinsi Papua). Negara kepulauan sering pula disebut negara maritim. Wilayah suatu negara maritim meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan laut.

Hampir seluruh penduduk berdiam atau berada di wilayah daratan, oleh karena itu pembangunan wilayah (daratan) sangat penting perannya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas berbagai sektor pembangunan, dan keberhasilannya dicerminkan oleh peningkatan pendapatan perkapita, yang mencerminkan pula peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan yang dilaksanakan berhasil mencapai esensinya, harus ditunjang oleh penyusunan rencana yang komprehensif dan terarah. Penyusunan rencana atau perencanaan itu merupakan suatu alat atau cara untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dengan baik. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pedoman dan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan perencanaan dilakukan perkiraan (*forecasting*) mengenai potensi, prospek, hambatan dan risiko yang dihadapi. Dengan